

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)**

Diajukan Oleh

NURFAJRI ARDIANTI S PANGGALO

4514013035



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG)

Nama Mahasiswa : Nurfajri Ardianti S Panggalo

Stambuk /NIM : 4514013035

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes

Thanwin, SE., M.Si

**Mengetahui dan Mengesahkan:**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi**

**Ketua Program Studi**

**Universitas Bosowa**

**Akuntansi**

Dr. H.A. Arifuddin Mané, SE., M.Si., SH., MH

Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan .....

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilalamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala kekurangannya. Skripsi dengan judul **“Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)”** merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengaruh, bimbingan, bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu izinkanlah penulis mengapresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Ayahanda Salama,S.Sos dan Ibunda Siti Rukiah,S.Pd sebagai pembimbing, pendidik dan pelindung utama hidup penulis, serta membesarkan dan mendidik penulis untuk bersifat terbuka, kreatif, berani, sabar, mandiri dan bijaksana, sehingga rasa terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis kepada Ayah dan Ibu. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakanda Nur Fitriani S Panggalo,S.Ip, kakanda Nurul Pratiwi S Panggalo,S.KM, adinda Nurul Rofida Anjani S Panggalo, adinda Muh.Nur Ardiansyah S Panggalo dan

seluruh keluarga besar penulis dimanapun kalian berada. Terima kasih atas doanya selama ini.

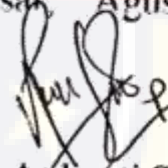
2. Bapak Dr.Muhtar Sapiri,SE.,Mm.,M.Kes dan bapak Thanwain,SE.,M.Si atas kesediaannya untuk meluangkan waktunya memberikan arahan, motivasi dan bimbingan dari awal hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen penguji skripsi penulis, yang telah memberikan saran-saran dan kritik mengenai skripsi yang telah dibuat penulis.
4. Bapak Thanwain,SE.,M.Si selaku Penasehat Akademik penulis, terima kasih atas semangat dan bimbingannya bagi penulis selama ini, mulai dari semester 1 hingga selesainya penulis menempuh studi.
5. Bapak Dr.H.A.Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH. dan ibu Dr.Hj.Herminawati Abu Bakar, SE., MM selaku Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar yang selama ini tak kenal lelah mentransfer ilmu khususnya kepada penulis serta kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi secara keseluruhan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan didikannya selama ini.
7. Para pegawai dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu penulis dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas bantuannya.

8. Pemerintah Kabupaten Enrekang khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah yang telah memberikan izin melakukan penelitian. Terima kasih.
9. Devi Sartika, Pusfita Sari, Sunarti Rahman, Arnita, Nur Qolbi, dan seluruh teman-teman yang tidak sempat disebut namanya, terima kasih karena telah banyak membantu, menyemangati dan memberikan masukan kepada penulis.

Sebagai penutup Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan pengetahuan dan kemampuan penulis, namun sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat.

v

Makassar, Agustus 2018



Nurfajri Ardianti S Panggalo

**PENGARUH EFEKTIFITAS PENERAPAN STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG)**

Oleh :

**NURFAJRI ARDIANTI S PANGGALO**

Email: [ninispanggalo@gmail.com](mailto:ninispanggalo@gmail.com)

**Pembimbing I**

**Dr. Muhtar Sapiri, SE.,MM.,M.Kes**

Email: [muhtar.sapiri@yahoo.co.id](mailto:muhtar.sapiri@yahoo.co.id)

**Pembimbing II**

**Thanwain, SE.,M.Si**

Email: [thanwaintala@yahoo.co.id](mailto:thanwaintala@yahoo.co.id)

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi**

**Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

Nurfajri Ardianti S Panggalo.2018.Skripsi.Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahn Kabupaten Enrekang) dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, SE.,MM.,M.Kes dan Thanwain SE.,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 30 orang pegawai/staf dari Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah bidang akuntansi dan bidang anggaran.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



**EFFECT OF EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT  
ACCOUNTING STANDARDS ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT  
FINANCIAL REPORTS (STUDY ON ENREKANG REGION DISTRICT  
GOVERNMENT**

**by :**

**NURFAJRI ARDIANTI S PANGGALO**

***Prodi Accounting Faculty of Economics***

***Bosowa University***

**ABSTRACT**

*NURFAJRI ARDIANTI S PANGGALO.2018.Skripsi.Effect of Effectiveness of the Implementation of Government Accounting Standards of Local Government Financial Reports (Study on Enrekang Region District Government), guided by Dr.Muhtar Sapiri, SE.,MM.,M.Kes and Thanwain, SE.,M.Si.*

*This study aims to determine the Effectiveness of the Implementation of Government Accounting Standards on Quality of Local Government Financial Reports in Enrekang Regency. In this study the samples taken were 30 employees/staff from the Regional Finance Management Agency in the field of accounting and budgeting.*

*The result of this study prove that the effectiveness of the application of Government Accounting Standards has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports.*

***Keywords:*** *Effectiveness of Implementing Government Accounting Standards. Quality of local Government Financial Reports.*

**PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

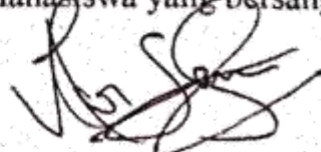
Nama : Nurfajri Ardianti S Panggalo  
Nim : 4514013035  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul : Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya hasil penelitian di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Agustus 2018

Mahasiswa yang bersangkutan



NIURFAJRI ARDIANTI S PANGGALO



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Kerangka Teori .....	11
2.1.1 Teori Entitas.....	11
2.1.2 Teori Kegunaan-keputusan.....	12
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan .....	13
2.1.4 Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan .....	14
2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan .....	18

2.1.6	Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	21
2.2	Kerangka Pemikiran .....	22
2.3	Hipotesis .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>25</b>
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian .....	25
3.2	Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	26
3.4	Populasi dan Sampel .....	26
3.5	Analisis Data .....	26
3.6	Analisis Statistik Deskriptif .....	27
3.7	Uji Regresi Linear Sederhana .....	27
3.8	Uji Hipotesis .....	28
3.8.1	Uji t Parsial .....	28
3.9	Defenisi Operasional Variabel .....	28
3.9.1	Variabel Independen .....	28
3.9.2	Variabel Dependen .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>30</b>
4.1	Tinjauan Umum tentang Subjek Penelitian .....	30
4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang .....	30
4.1.2	Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang .....	30
4.1.3	Visi dan Misi Badan Pengelola Kabupaten Enrekang .....	31

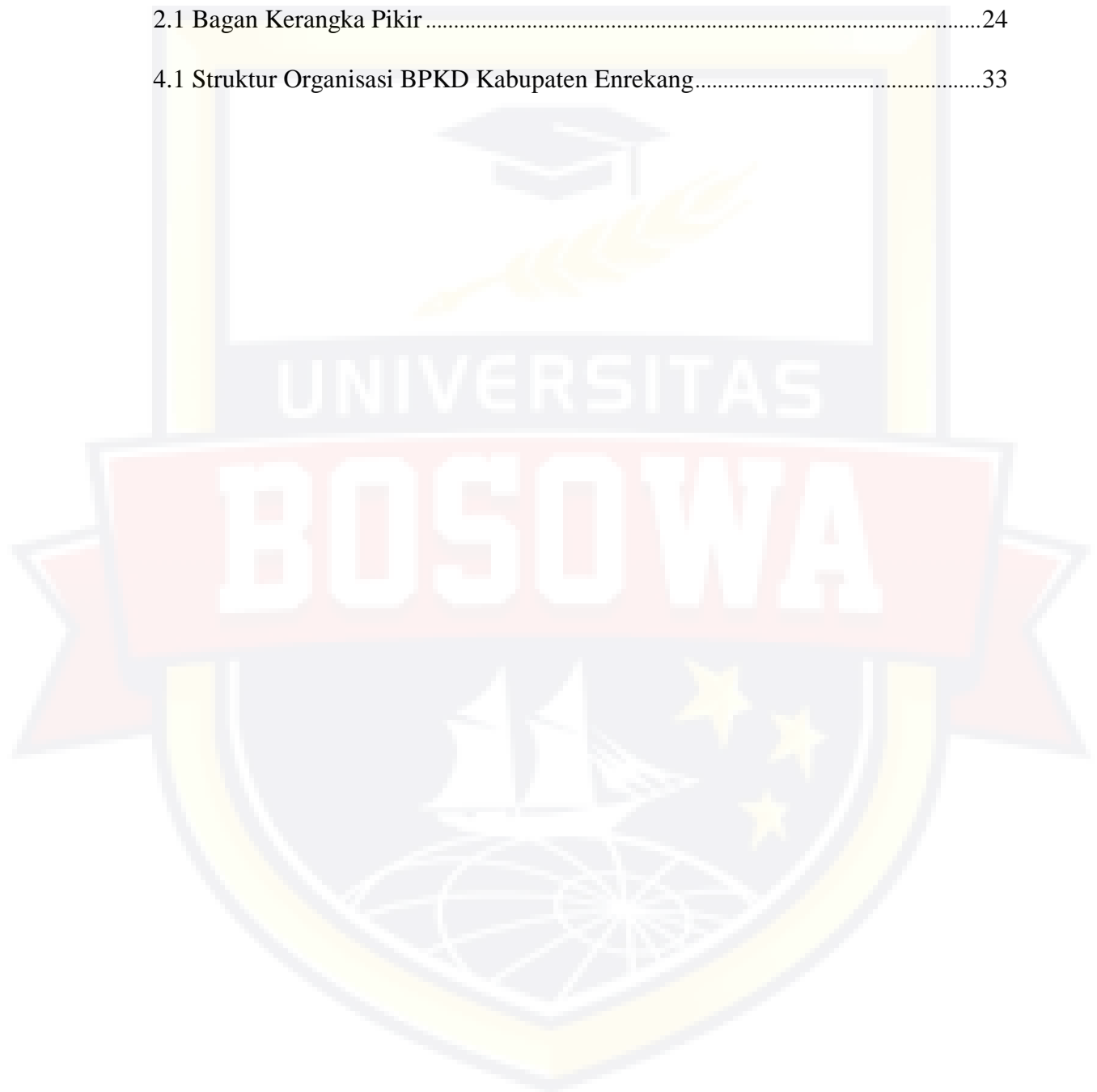
4.1.4 Struktur Organisasi .....	33
4.1.5 Tugas dan Fungsi .....	34
4.2 Deskriptif Data .....	40
4.3 Uji Validitas .....	42
4.4 Uji Reabilitas .....	44
4.5 Uji Analisis Statistik Deskriptif .....	45
4.6 Uji Regresi Linear Sederhana .....	46
4.7 Pengujian Hipotesis .....	47
4.7.1 Uji t Parsial .....	48
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian .....	49
4.8.1 Hasil Uji Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	49
4.8.2 Hasil Uji Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	49
4.8.3 Hasil Uji Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	51
5.3 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016.....	5
4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	41
4.2 Karakteristik Responden .....	41
4.3 Uji Validitas .....	43
4.4 Uji Reabilitas.....	44
4.5 Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	45
4.6 Uji Regresi Linear Sederhana .....	46

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir .....	24
4.1 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Enrekang.....	33



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Era globalisasi dunia, ditandai dengan munculnya kesepakatan ekonomi regional diantaranya disetujuinya pembentukan masyarakat ekonomi Asean (*Asean Economic Community*) yang telah dilaksanakan pada tahun 2015. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menetapkan otonomi daerah yang telah dicanangkan oleh pemerintah menuntut pemerintahan pusat ataupun daerah untuk menghasilkan informasi yang transparan dan akuntabel. UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan aturan ini maka pemerintahan pusat/daerah dituntut untuk dapat mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar atau panduan untuk menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya dasar peraturan tentang standar akuntansi pemerintahan, pemerintah dituntut untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan standar akuntansi pemerintahan sebagai landasan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas dalam rangka menciptakan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).



Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD 1945 tentang Keuangan Negara perlu dijabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD ke dalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan asas spesialisasi. Selain asas tersebut dalam rangka penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara juga ditetapkan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk sistem yang tepat.

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Dalam hal desentralisasi keuangan dan otonomi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan suatu paket kebijakan tentang pengelolaan keuangan negara yaitu: Penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun

pengertian standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yaitu “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Hal ini berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah.

Hal ini dapat kita lihat dari Hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Sulawesi Selatan TA 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Enrekang yang mendapatkan opini TMP (*Disclaimer*). Alasan memberikan pendapat tersebut dikarenakan terdapat temuan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tidak sesuai pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Data hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Enrekang serta temuannya dari tahun 2012-2016 disajikan dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012 s.d. 2016**

LKPD (Tahun)	Opini
2012	WDP
2013	WDP
2014	WDP
2015	WDP
2016	TMP

Pemeriksaan LKPD Kabupaten Enrekang TA 2012-2016

Dari tabel 1.1 yang menyajikan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang dari TA 2012 sampai TA 2016 terlihat bahwa BPK telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*) atas LKPD Kabupaten Enrekang pada tahun 2016. Hal tersebut berarti bahwa terjadi penurunan dalam penyajian laporan keuangan Kabupaten Enrekang dari opini yang sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian menjadi Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*).

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cerminan bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Paragraf 9) sesuai PP No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif meliputi relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Khusus untuk karakteristik kualitatif relevan, sebuah informasi dalam laporan keuangan pemerintah dinyatakan memiliki nilai relevan jika informasi tersebut memenuhi empat kriteria, yang terdiri dari nilai umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timelines*) dan lengkap (*completeness*).

Terkait dengan hal ini, Juwita sari (2018) yang melakukan penelitian untuk menguji apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Asahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Asahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada indikator penelitian efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pada objek penelitian.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari, dkk (2014) untuk mengetahui apakah pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas-dinas di Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jembrana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini menggunakan pengukuran efektivitas, tidak menggunakan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan memiliki objek penelitian yang berbeda.

Dalam penelitian ini penulis tertarik dengan fenomena yang dihadapi kabupaten Enrekang mengenai hasil audit BPK tentang laporan keuangan daerah pada Kabupaten Enrekang. Menurut informasi Perwakilan BPKD Kabupaten Enrekang, “Kabupaten Enrekang pada tahun 2016 mendapatkan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)”. Dimana opini ini tidak bisa diartikan bahwa laporan keuangan sudah benar atau salah. Opini diberikan karena auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan benar atau salah. Ini terjadi karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar atau salah.

Menurut informasi dari berbagai tingkatan pegawai di Kantor Pemerintahan Kabupaten Enrekang, laporan keuangan Kabupaten Enrekang tidak pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sesuai yang dilansir oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan tentang hasil pemeriksaan laporan keuangan beberapa tahun terakhir bahwa hal-hal yang menjadi temuan BPK RI di Kabupaten Enrekang diantaranya mengenai piutang lainnya, aset, penyajian utang jangka pendek, penerimaan dan penggunaan retribusi pelayanan kesehatan serta belanja hibah. Hal ini menggambarkan ada yang salah atau kurang efektif dalam



penerapan standar akuntansi pemerintah yang seharusnya menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Indonesia yang telah menetapkan standar akuntansi pemerintahannya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman aparaturnya atas penerapan PP No.71 Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sangat penting dalam penciptaan kualitas laporan keuangan yang baik karena dengan penerapan yang maksimal akan memberikan laporan keuangan yang juga semakin baik sehingga pertanggungjawaban pemerintah akan semakin tinggi terhadap masyarakat terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan kinerja pemerintah. (Oktarina, 2016) menyatakan bahwa “Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi”. Oleh sebab itu standar akuntansi pemerintahan dan penerapannya sangat penting bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat.

Dari hasil pemaparan diatas yang terkait dengan fenomena yang dialami oleh pemerintahan Kabupaten Enrekang untuk melihat adanya hubungan antara efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka saya bermaksud untuk mencoba meneliti tentang “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang disesuaikan dengan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya yaitu: Apakah efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Enrekang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penulisan penelitian ini, diharapkan berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah:

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dan daerah lainnya dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara efektif agar laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik sehingga informasi yang dihasilkan dan digunakan nantinya dari laporan keuangan tersebut akan maksimal.

### 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh akademisi untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan untuk menjalin kerjasama antara akademisi dan pemda sehingga tercipta sinergi yang positif diantara keduanya.

### 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan peneliti terkait permasalahan akuntansi yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Enrekang khususnya masalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 4. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan bagi masyarakat agar dapat memberikan partisipasi, kontrol, dan memberikan kontribusi dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggung jawaban keuangan daerah dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Entitas**

Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono dalam Puji Santoso, 2016), dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (*reporting entity*) yang bertanggungjawab kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggung-jawabannya.

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundangundangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang berbunyi: tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Puji Santoso, 2016). Dalam penyajian Informasi Akuntansi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa

bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### **2.1.2 Teori Kegunaan-keputusan (*Decision-usefulness Theory*)**

Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat (Staubus 2000). Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *a theory of accounting to investors* (Staubus 2003). Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Adapun kaidah-

kaidah yang harus terpenuhi sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dimuat dalam kerangka konseptual agar memenuhi tujuannya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

### **2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 71 (2010): Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah manfaat standar akuntansi pemerintahan: (1) standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan; (2) standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya; (3) standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan; (4) standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan; dan (5) standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan ditetapkannya SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan



pemerintahan yang baik (*good governance*). Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Deddy dan Hartianti, 2014:23). Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: (1) pengakuan; (2) pengukuran; dan (3) pengungkapan.

#### **2.1.4 Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Suatu sistem dikatakan efektif jika output yang dihasilkan oleh suatu orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam Robert & Vijay (2005:174) dikatakan bahwa “efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu piasat tanggung jawab dengan tujuannya”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu guna dalam peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas diperlukan suatu system pengendalian intern yang baik. Dalam lingkungan pemerintahan Sistem pengendalian Intern disebut SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah No.60 tahun tahun 2008, pasal 1 no.2).

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No.60 tahun tahun 2008, pasal 1 no.1).

Menurut Moeller dan Robert (2009:33), terdapat lima komponen pengendalian internal baik untuk pengendalian intern pemerintah maupun perusahaan bisnis:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian resiko;
3. Aktifitas pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi;
5. Pemantauan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar,

penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

### 1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

### 2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

### 3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan

digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

#### 4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

#### 6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi

ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### 7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

#### **2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Permadi dalam Pravitasari Eka Ningtyas (2015:15) menyatakan “laporan keuangan adalah suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang

memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode”.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

#### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu:

##### a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

##### b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

##### c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.



d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan memerhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Laporan keuangan bisa dikatakan andal jika informasi yang terkandung di dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para adanya pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

##### **2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Selain itu menurut pendapat Deddi Nordiawan dalam I Wayan Karsana dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana (2017:27) menyatakan bahwa adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu “SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah”.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat

menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan cita-cita semua bangsa, tak terkecuali Indonesia. Untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem yang bisa mengatur kehidupan masyarakat dalam segala bidang, baik sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Di Indonesia sendiri telah banyak dikeluarkan undang-undang untuk mengatur segala bidang kemasyarakatan guna terciptanya *good governance*. Salah satunya Undang-undang yang mengatur tentang bidang ekonomi, khususnya pengelolaan keuangan Negara. Munculnya berbagai masalah terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara mulai dari penyelewengan anggaran sampai pada masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menarik perhatian pemerintah untuk menciptakan suatu perundang-undangan untuk memudahkan dalam penyelesaian segala masalah yang ada.

Khusus dalam penyelesaian masalah tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, telah dikeluarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 yang telah diubah menjadi UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan dan Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

maka terhitung tahun anggaran 2001, diharapkan terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan Daerah. Salah satunya adalah Laporan Keuangan.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu standar akuntansi. Penerapan standar akuntansi Pemerintahan suatu Negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara yang bersangkutan. Untuk negara Indonesia telah dikemukakan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

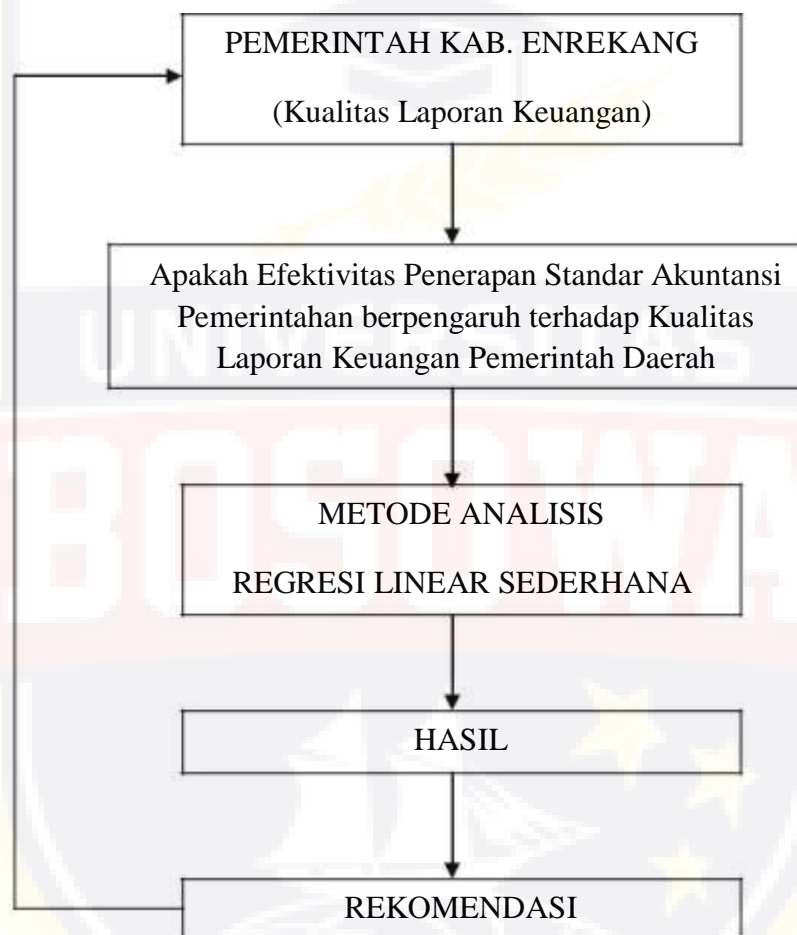
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas harus memenuhi prasyarat yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk laporan keuangan

pada umumnya terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

**Gambar 2.1**

**BAGAN KERANGKA PIKIR**



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Diduga Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada lingkup pemerintahan Kabupaten Enrekang, tepatnya di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli tahun 2018.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
  - a. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
  - b. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang

diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner/angket. Data penelitian kemudian diukur dengan menggunakan *Skala Likert*.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang pegawai/staf yang berada di bidang akuntansi dan bidang anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*, yakni teknik yang menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus atau dengan beberapa pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Syarat yang harus dipenuhi responden penelitian adalah pegawai yang sudah ditetapkan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan merupakan pegawai yang terlibat serta berwenang dalam penyusunan laporan keuangan daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

### **3.5 Analisis Data**

Untuk memperoleh data tentang Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah, dibuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan *Skala Likert*. *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

### **3.6 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden, seperti lembaga pemerintahan, usia, jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan, dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.

### **3.7 Uji Regresi Linear Sederhana**

Regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X = Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)



### 3.8 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah apakah efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pemerintah daerah pada Kabupaten Enrekang.

#### 3.8.1 Uji-t (Parsial)

Uji t yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain itu konstan. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  atau dengan melihat kolom signifikan pada masing-masing  $t_{hitung}$ . Dasar pengambilan keputusan yaitu: 1) Jika probabilitas (signifikansi)  $> 0,05$  berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara uji parsial, 2) Jika probabilitas (signifikansi)  $< 0,05$  berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

### 3.9 Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat variabel yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian. Kedua variabel tersebut meliputi variabel independen atau variabel bebas, yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan serta variabel dependen atau variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan daerah.

#### 3.9.1 Variabel Independen (Variabel bebas)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (Sugiyono, 2013:34). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah: Efektivitas

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X). Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Indikator-indikator yang digunakan yaitu basis akuntansi, nilai historis, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Kedelapan indikator tersebut masing-masing dijadikan pedoman kedalam item-item pertanyaan pada kuisisioner. Responden diminta untuk memilih satu dari lima skala pada setiap pertanyaan sesuai yang dipraktikkan oleh instansinya. Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan efektif (ditunjukkan dengan skala seluruhnya diterapkan) atau rendah (ditunjukkan dengan skala tidak diterapkan).

### **3.9.2 Variabel Dependen (Variabel terikat)**

Variabel Dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Arikunto, 2011). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah: Kualitas Laporan Keuangan (Y) yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Variabel atau indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010). Keempat indikator tersebut masing-masing dijadikan pedoman kedalam item-item pertanyaan pada kuisisioner. Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah Laporan keuangan berkualitas (ditunjukkan dengan skala seluruhnya diterapkan) atau tidak berkualitas (ditunjukkan dengan skala tidak diterapkan).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Tinjauan Umum tentang Subyek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang**

Enrekang berdiri sebagai satu Kabupaten berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (LN No. 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Enrekang berdiri sendiri sebagai satu Kabupaten dengan ibukotanya Enrekang. Kabupaten Enrekang sebagai salah satu daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dan masyarakat umum.

Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai suatu organisasi telah menyusun dan menetapkan kembali beberapa lembaga/instansi otonom berdasarkan peraturan daerah, yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

##### **4.1.2 Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang**

Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretariat Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Adapun beberapa fungsi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yaitu:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Enrekang**

Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang: “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.”

Untuk mewujudkan Visi di atas, maka harus ditetapkan juga Misi yang harus mendapatkan perhatian seksama dimana tugas yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah: “Mengoptimalkan pendapatan dan

meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh penatausahaan yang tertib serta meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait demi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah.”





#### 4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1

#### STRUKTUR ORGANISASI BPKD KABUPATEN ENREKANG



#### 4.1.5 Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

##### 1. Sekretariat

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, evaluasi, program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- d. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan kekayaan daerah;
- g. Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, pengadaan dan kearsipan;
- h. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor.

##### 2. Sub Bagian Perencanaan

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan;
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rencana anggaran satuan dan dokumen anggaran satuan kerja BPKD;



- e. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
3. Sub Bagian Keuangan
- a. Menyusun RKA dan DPA/DPPA;
  - b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - c. Melaksanakan tata laksana dan pengolahan data keuangan;
  - d. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategi Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - f. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dang anti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
  - g. Melaksanakan pengadaan barang jasa;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Melaksanakan urusan persuratan;
  - b. Melaksanakan urusan rumah tangga;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan LHKPN;
  - d. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris;

- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, dokumentasi, ketatalaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan penegakan disiplin pegawai;
- f. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, serta pemberhentian dan pensiun;
- g. Melaksanakan pengembangan karier pegawai, pembinaan jabatan fungsional, serta pengelolaan data dan arsip kepegawaian;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### 5. Bidang Anggaran

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
- c. Merumuskan kebijakan pelaksanaan APBD dan APBD-P;
- d. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memeriksa dan meneliti bahan, data dan informasi untuk setiap unit kerja dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA);
- f. Memeriksa kesesuaian antara jumlah dan jenis penerimaan dan pengeluaran dengan DPA;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pembendaharaan

- a. Pengumpulan, pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan bidang pembendaharaan dan verifikasi;
- b. Pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitan Surat Perintah Membayar dari SKPD;
- c. Pemberian pertimbangan serta mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah pembendaharaan dan ganti rugi;
- d. Pelaksanaan sistim penggajian, pelaporan data-data PNS yang efektif dan efisien;
- e. Pelaksanaan koordinasi penerimaan daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

7. Bidang Verifikasi

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengujian surat pertanggungjawaban (SPJ-LS);
- c. Memberikan rekomendasi pengesahan Surat Perintah Membayar dan SPJ-LS;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## 8. Bidang Akuntansi

- a. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program bidang akuntansi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah pada SKPD;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan bimtek akuntansi pemerintah serta regulasi keuangan lainnya;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 9. Sub Bidang Belanja Langsung

- a. Menyusun dan menyiapkan data anggaran belanja langsung;
- b. Melakukan evaluasi data anggaran belanja langsung sebagai bahan penyusunan APBD dan APBD-P;
- c. Menyusun rancangan APBD dan rancangan APBD-P untuk belanja langsung;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## 10. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Pengelolaan Kasda

- a. Menyusun dan menyiapkan data perencanaan anggaran belanja gaji, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja pembiayaan daerah;

- b. Melakukan evaluasi belanja anggaran belanja gaji, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terguna dan belanja pembiayaan daerah sebagai bahan penyusunan APBD dan APBD-P;
- c. Menyusun rancangan APBD dan rancangan APBD-P untuk anggaran belanja gaji, belanja bunga, belanja, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja pembiayaan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### 11. Sub Bidang Verifikasi Penatausahaan Keuangan

- a. Melakukan konsolidasi penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- b. Melaksanakan konsolidasi penatausahaan meliputi pembukuan daftar barang pengguna dan daftar barang pengelola, melakukan inventarisasi serta menyusun laporan semester dan laporan tahunan Barang Milik Daerah;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### 12. Sub Bidang Verifikasi Pertanggungjawaban

- a. Melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
- b. Melakukan verifikasi pendapatan yang telah diterima dan rekonsiliasi dengan BUD;

- c. Melakukan konsolidasi Laporan Realisasi Pendapatan dengan SKPD;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **4.2 Deskriptif Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 30 eksemplar. Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden yang akan diteliti, dilakukan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada para responden. Kuesioner yang telah selesai diisi oleh responden dikumpulkan kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dalam *Microsoft Office Excel* dan diolah dengan menggunakan program *SPSS for Windows*. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kuesioner-kuesioner tersebut berkisar 2 (dua) minggu waktu kerja.

## 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah Data
Jumlah kuesioner yang dikirim	30
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0
Jumlah kuesioner yang kembali	30
Jumlah kuesioner yang tidak dapat digunakan	0
Jumlah kuesioner yang dapat digunakan	30
N sampel	30
Responden rate	$(30/30) \times 100\% = 100\%$

Sumber: Pengolahan Data Primer 2018

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa kuesioner yang kembali sebanyak 30 eksemplar atau 100% kuesioner yang dikirim dapat digunakan.

## 2. Karakteristik Responden

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden**

Kriteria Sampel		Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	14	46.66
	Perempuan	16	53.33
Umur	25-35	6	20.00
	36-45	17	56.66
	46-55	5	16.66
	55 tahun keatas	1	3.33
Pendidikan Terakhir	S2	11	36.66
	S1	13	43.33
	D3/D4	0	0
	SMA/ sederajat	6	20.00
Lama Bekerja	1-5 tahun	2	6.66

	6-10 tahun	17	56.66
	11-15 tahun	3	10.00
	Diatas 15 tahun	8	26.66

Sumber: Pengolahan Data Primer 2018

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang atau sekitar 46.66% dan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang atau sekitar 52.33%. Kebanyakan responden berumur 36 – 45 tahun, yaitu sebanyak 17 orang atau sekitar 56.66%, sebanyak 6 orang atau sekitar 20% berumur 25 – 35 tahun, berumur 46 – 55 tahun sebanyak 5 orang atau sekitar 16.66%, dan yang berumur diatas 55 tahun sebanyak 1 orang atau sekitar 3.33%.

Untuk pendidikan, jumlah responden yang terlibat dalam proses penyusunan, pelaporan dan pemeriksaan laporan keuangan secara langsung lebih banyak bergelar S1 yaitu 13 orang atau sekitar 43.33%. S2 sebanyak 11 orang atau sekitar 36.66%, SMA/ sederajat sebanyak 6 orang atau sekitar 20%, dan tidak ada responden yang memiliki pendidikan terakhir D3/D4.

### 4.3 Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan analisis faktor menggunakan alat bantu SPSS. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan pada kuesioner layak untuk diteliti. Uji Validitas dilakukan kepada 30 responden yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah  $r = 0,3$ . Jadi, pernyataan dinyatakan valid atau layak apabila  $r$ -hitung  $> 0,3$ . Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :



**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r-hitung	r-min	Keterangan
Efektifitas SAP (x1)	x1.1	0,740	0,3	Valid
	x1.2	0,750	0,3	Valid
	x1.3	0,798	0,3	Valid
	x1.4	0,605	0,3	Valid
	x1.5	0,706	0,3	Valid
	x1.6	0,672	0,3	Valid
	x1.7	0,405	0,3	Valid
	x1.8	0,611	0,3	Valid
	x1.9	0,710	0,3	Valid
	x1.10	0,648	0,3	Valid
	x1.11	0,614	0,3	Valid
	x1.12	0,763	0,3	Valid
	x1.13	0,720	0,3	Valid
	x1.14	0,743	0,3	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (y1)	y1.1	0,875	0,3	Valid
	y1.2	0,736	0,3	Valid
	y1.3	0,661	0,3	Valid
	y1.4	0,722	0,3	Valid
	y1.5	0,866	0,3	Valid
	y1.6	0,718	0,3	Valid
	y1.7	0,740	0,3	Valid

	y1.8	0,804	0,3	Valid
	y1.9	0,702	0,3	Valid

Sumber : Output SPSS 2018

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa uji validitas yang dilakukan terhadap 30 orang dinyatakan valid. Hal ini dapat disimpulkan dengan melihat bahwa setiap variabel memiliki  $r$ -hitung  $> 0,3$ . Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh pernyataan yang dibuat dinilai layak dan dapat digunakan untuk keperluan penelitian.

#### 4.4 Uji Reabilitas

Uji Reabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkain alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan berulang. Suatu konstrukstur atau variabel dikatakan reliabel, jika memiliki nilai *alpha cronbach*  $\geq r_{\text{tabel}}$  signifikansi 5%. Berikut ini merupakan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap 30 orang responden yang dinilai memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Efektifitas Penerapan SAP (X1)	0,780	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y2)	0,780	Reliabel

Sumber : Ouput SPSS 2018

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa uji reabilitas yang dilakukan terhadap 30 orang responden menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan terpercaya. Hal

ini disimpulkan dengan melihat bahwa setiap variabel memiliki nilai alpha cronbach  $> r_{\text{tabel}}$  diperoleh nilai sebesar 0,361. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh pernyataan yang dibuat dinilai layak dan dapat digunakan untuk keperluan penelitian.

#### 4.5 Uji Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini mempunyai fungsi untuk menggambarkan karakter sampel serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 4.5**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
SAP	30	53.00	70.00	67.0000	62	4.41002
Kualitas Laporan Keuangan	30	32.00	45.00	42.8667	39	3.47139
Valid N (listwise)	30					

Sumber: Output SPSS 2018

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki kisaran empiris antara 53 sampai dengan 70 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 67,000 dan standar deviasi (*standar deviation*) sebesar 4.410.

Dengan nilai rata-rata (*mean*) median, menunjukkan efektifitas penerapan SAP diterapkan dengan baik. Nilai standar deviasi menunjukkan penyimpangan yaitu sebesar 4,410 dari nilai rata-rata (*mean*) jawaban responden atas pertanyaan tentang Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah memiliki kisaran empiris antara 32 sampai dengan 45 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42,866 dan standar deviasi (*standar deviation*) sebesar 3,471. Dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42,866 melewati nilai median 39 menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sangat baik. Nilai standar deviasi menunjukkan penyimpangan sebesar 3,471 dari nilai rata-rata (*mean*) jawaban responden atas pertanyaan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.6 Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah positif atau negatif dan memprediksi nilai dari variabel independen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Untuk mengetahui hasil tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.6**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6.552	3.488		-1.878	.071

SAP	.738	.052	.937	14.196	.000
-----	------	------	------	--------	------

a. Dependent Variable: KUALITAS  
Sumber : Output SPSS 2018

Berdasarkan tabel koefisien diperoleh nilai konstanta (a) = -6,552 dan koefisien regresi (b) = 0,738 sehingga persamaan regresinya adalah:

$$Y = -6,552 + 0,738x$$

Penelitian menggunakan angket dengan skala likert antara 1 sampai 5, maka interpretasi di atas tidak boleh dilakukan karena variabel X tidak mungkin bernilai nol. Interpretasi dengan skala likert tersebut sebaiknya menggunakan nilai *standardized coefficient* sehingga tidak ada konstanta karena nilainya telah distandarkan. Sehingga  $Y = 0,738 X$  dan diinterpretasikan bahwa peningkatan efektifitas penerapan SAP akan diikuti dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau penurunan efektifitas penerapan SAP juga akan diikuti dengan penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, peningkatan efektifitas penerapan SAP dalam satu satuan unit akan diikuti dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,738 (74%).

Pada hasil SPSS menunjukkan nilai korelasi koefisien sebesar 0,937 dengan demikian, dapat dikatakan terdapat hubungan yang linier antara variabel X dan variabel Y. Hubungan linier yang terjadi adalah positif dan kuat.

#### 4.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear sederhana dan uji t parsial. Uji regresi linear sederhana digunakan untuk

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung melalui suatu persamaan. Uji t parsial digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain itu konstan.

#### 4.7.1 Uji t Parsial

Sementara itu untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai tabel.

Berdasarkan hasil output SPSS nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari probabilitas 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan tabel koefisien diketahui hasil perhitungan uji t diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,000 dan untuk mencari nilai  $t_{tabel}$  menggunakan rumus:

$$\text{Nilai } \alpha / 2 = 0,05 / 2 = 0,025$$

$$\text{Derajat kebebasan (df)} = n - 2 = 30 - 2 = 28$$

Maka, nilainya 0,025 ; 28

Kemudian, kita lihat pada distribusi nilai t tabel. Tabel menunjukkan nilai sebesar 2,048. Karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $14,196 > 2,048$ ) sehingga

dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti “ada pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

## **4.8 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.8.1 Hasil Uji Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan hasil uji t parsial yang telah dilakukan untuk menguji efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah efektif. Hal ini sesuai dengan variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi (X) yang memiliki kisaran empiris antara 53 sampai dengan 70 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 67,000 dan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 4.410. Yang berarti Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan masuk kriteria “Efektif”. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah Kabupaten Enrekang sudah baik.

### **4.8.2 Hasil Uji Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t parsial yang telah dilakukan untuk menguji kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan sudah efektif. Hal ini sesuai dengan variabel kualitas laporan keuangan (Y) yang memiliki kisaran empiris antara 32 sampai dengan 45 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42,866 dan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar

3,471. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 42,866 yang melewati nilai median 39, berarti menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang masuk dalam kriteria “Berkualitas”. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang sudah baik.

#### **4.8.3 Hasil Uji Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah berdasarkan hasil

uji t parsial yang telah dilakukan antara Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel X terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel Y menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 14,196 dengan nilai signifikan (Sig.) sebesar  $0,000 < 0,05$  dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,738 menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan semakin baik atau besar, maka semakin berkualitas pula laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai yang diharapkan memerlukan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan/pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah, dalam ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2014) dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki Pengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang melalui wawancara dan penyebaran angket/kuesioner, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sudah efektif, kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah baik (berkualitas) dan terdapat pengaruh efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas 1 (satu) variabel independen yang berhubungan dengan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Variabel lain diabaikan dan dianggap tidak mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah sehingga hanya mencerminkan kondisi yang pada dinas tersebut dan tidak dapat digeneralisasi pada semua keadaan.

3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi jawaban melalui kuesioner yang diberikan sehingga timbul perbedaan interpretasi atas maksud dan tujuan pernyataan.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kabupaten Enrekang

Secara operasional Dinas Kabupaten Enrekang sebaiknya memerhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan mampu untuk menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan serta mempunyai pemahaman yang luas mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Berhubung SDM yang memadai dan pengetahuan belum dimiliki, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga laporan keuangan akan lebih berkualitas.

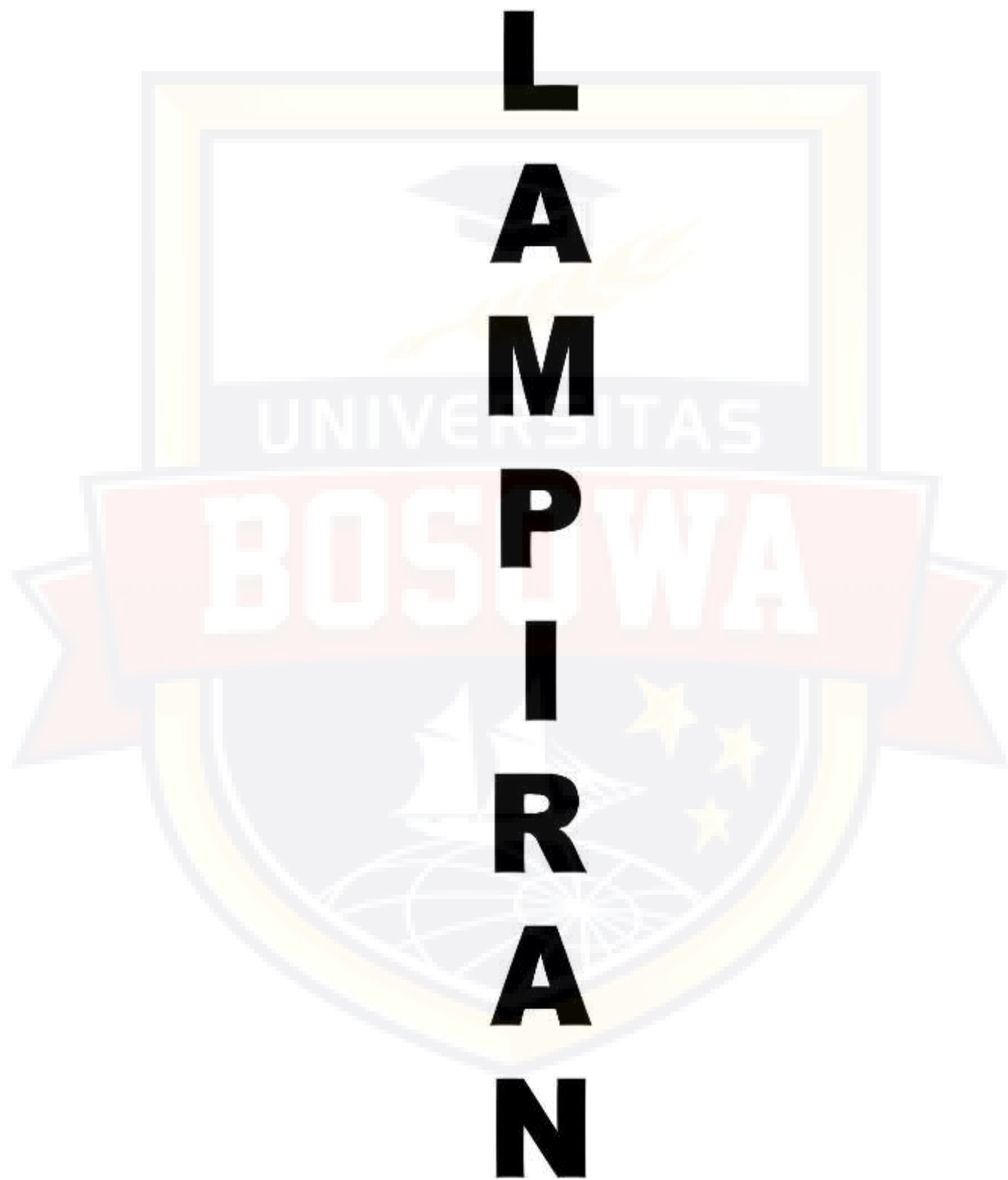
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Secara akademis, penelitian ini hanya mencakup Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar meneliti tentang Sumber Daya Manusia, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kinerja Pegawai. Selain itu, jumlah sampel yang diteliti sebaiknya diperbanyak lagi untuk memperkuat hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N.N. 2014. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Deddy & Hartianti, 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)*. JOM Fekon. Vol. 4 No.1. Februari (2014).
- Karsana, I Wayan & I Gusti Ngurah Agung Suaryana. 2017. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Spi Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober (2017).
- Ningtyas, Pravitasari Eka. 2015. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 4 No. 1 (2015)
- Nurani, Heni H & Euis Eti Sumiyati. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintahan Daerah Di Jawa Barat)*. Akuntansi, Universitas Jenderal Achmad Yani. *Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEB) 2014*. Proceedings SNEB 2014: Hal. 2
- Nurlaila. 2014. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Oktarina, Mia. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang*. Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret (2016). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Agustus 2005. Jakarta : Redaksi Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah*. 2009. Jakarta: Komite Pengendalian Intern.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2011. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sari, Juwita. 2018. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan)*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sari, dkk. 2014. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 No.1.
- Santoso, Puji. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung*. Tesis tidak diterbitkan. Bandar Lampung: Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.



**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAP	30	53.00	70.00	67.0000	4.41002
KUALITAS	30	32.00	45.00	42.8667	3.47139
Valid N (listwise)	30				

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
SAP	67.0000	4.41002	30
KUALITAS	42.8667	3.47139	30

**Correlations<sup>a</sup>**

		SAP	KUALITAS
SAP	Pearson Correlation	1	.937**
	Sig. (2-tailed)		.000
KUALITAS	Pearson Correlation	.937**	1

Sig. (2-tailed)	.000
-----------------	------

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a. Listwise N=30

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.937 <sup>a</sup>	.878	.874	1.23389

a. Predictors: (Constant), SAP

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	306.837	1	306.837	201.536	.000 <sup>a</sup>
	Residual	42.630	28	1.522		
	Total	349.467	29			

a. Predictors: (Constant), SAP



ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	306.837	1	306.837	201.536	.000 <sup>a</sup>
	Residual	42.630	28	1.522		
	Total	349.467	29			

b. Dependent Variable: KUALITAS

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.552	3.488		-1.878	.071
	SAP	.738	.052	.937	14.196	.000

a. Dependent Variable: KUALITAS

**Titik Persentase Distribusi t (dk = 1 – 40)**

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499

<b>23</b>	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
<b>24</b>	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
<b>25</b>	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
<b>26</b>	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
<b>27</b>	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
<b>28</b>	0.68335	1.31253	1.70113	<b>2.04841</b>	2.46714	2.76326	3.40816
<b>29</b>	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
<b>30</b>	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
<b>31</b>	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
<b>32</b>	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
<b>33</b>	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
<b>34</b>	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
<b>35</b>	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
<b>36</b>	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
<b>37</b>	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
<b>38</b>	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
<b>39</b>	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
<b>40</b>	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326		

## Uji Validitas dan Reliabilitas X1

### Correlations

	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	x1.10	x1.11	x1.12	x1.13	x1.14	SAP
x1.1															
Pearson Correlation	1	.535**	.845**	.144	.383*	.580**	.122	.288	.730**	.501**	.449*	.598**	.543**	.449*	.740**
Sig. (2-tailed)		.002	.000	.448	.037	.001	.521	.122	.000	.005	.013	.000	.002	.013	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.2															
Pearson Correlation	.535**	1	.537**	.437*	.391*	.620**	.228	.539**	.665**	.524**	.140	.447*	.625**	.490**	.750**
Sig. (2-tailed)	.002		.002	.016	.033	.000	.226	.002	.000	.003	.461	.013	.000	.006	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.3															
Pearson Correlation	.845**	.537**	1	.165	.598**	.629**	.249	.363*	.702**	.437*	.702**	.454*	.429*	.451*	.798**
Sig. (2-tailed)	.000	.002		.385	.000	.000	.185	.049	.000	.016	.000	.012	.018	.012	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.4															
Pearson Correlation	.144	.437*	.165	1	.412*	.209	.412*	.409*	.226	.271	.085	.692**	.641**	.650**	.605**
Sig. (2-tailed)	.448	.016	.385		.024	.269	.024	.025	.230	.148	.656	.000	.000	.000	.000

N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.5	Pearson Correlation	.383*	.391*	.598**	.412*	1	.404*	.237	.179	.328	.438*	.738**	.466**	.447*	.465**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.037	.033	.000	.024		.027	.207	.345	.077	.016	.000	.009	.013	.010	.000
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.6	Pearson Correlation	.580**	.620**	.629**	.209	.404*	1	.161	.304	.782**	.444*	.391*	.388*	.242	.130	.672**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.269	.027		.394	.102	.000	.014	.033	.034	.197	.493	.000
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.7	Pearson Correlation	.122	.228	.249	.412*	.237	.161	1	.179	.191	.007	.328	.291	-.010	.328	.405*
	Sig. (2-tailed)	.521	.226	.185	.024	.207	.394		.345	.311	.970	.077	.119	.957	.077	.026
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.8	Pearson Correlation	.288	.539**	.363*	.409*	.179	.304	.179	1	.453*	.411*	.247	.351	.567**	.659**	.611**
	Sig. (2-tailed)	.122	.002	.049	.025	.345	.102	.345		.012	.024	.188	.057	.001	.000	.000
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.9	Pearson Correlation	.730**	.665**	.702**	.226	.328	.782**	.191	.453*	1	.440*	.265	.376*	.361	.265	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.230	.077	.000	.311	.012		.015	.157	.041	.050	.157	.000

N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.10	Pearson Correlation	.501**	.524**	.437*	.271	.438*	.444*	.007	.411*	.440*	1	.324	.468**	.456*	.324	.648**
	Sig. (2-tailed)	.005	.003	.016	.148	.016	.014	.970	.024	.015		.080	.009	.011	.080	.000
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.11	Pearson Correlation	.449*	.140	.702**	.085	.738**	.391*	.328	.247	.265	.324	1	.376*	.197	.412*	.614**
	Sig. (2-tailed)	.013	.461	.000	.656	.000	.033	.077	.188	.157	.080		.041	.297	.024	.000
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.12	Pearson Correlation	.598**	.447*	.454*	.692**	.466**	.388*	.291	.351	.376*	.468**	.376*	1	.698**	.751**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013	.012	.000	.009	.034	.119	.057	.041	.009	.041		.000	.000	.000
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.13	Pearson Correlation	.543**	.625**	.429*	.641**	.447*	.242	-.010	.567**	.361	.456*	.197	.698**	1	.853**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.018	.000	.013	.197	.957	.001	.050	.011	.297	.000		.000	.000
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
x1.14	Pearson Correlation	.449*	.490**	.451*	.650**	.465**	.130	.328	.659**	.265	.324	.412*	.751**	.853**	1	.743**
	Sig. (2-tailed)	.013	.006	.012	.000	.010	.493	.077	.000	.157	.080	.024	.000	.000		.000

N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
SAP	Pearson Correlation	.740**	.750**	.798**	.605**	.706**	.672**	.405*	.611**	.710**	.648**	.614**	.763**	.720**	.743**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.026	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.780	10







KUALIT Pearson Correlation AS	.875 **	.736 **	.661 **	.722 **	.866 **	.718 **	.740 **	.804 **	.702 **	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.780	10